



# **MERDEKA...!**

## **perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia pahlawanku**

**Kami selalu akan  
meneruskan perjuanganmu  
wahai para pahlawanku.  
Semangat berjuang yang  
telah engkau wariskan  
kepada kami  
memberikan kami suatu tekad  
yang membara untuk selalu  
membangun dan menjaga  
negeri ini sampai  
titik darah penghabisan.**

---

**Hari Pahlawan 10 November**

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA :** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan  
DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:**  
Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan &  
Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:**  
Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur  
Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-  
RI Sejak Mei 1991

**PADAMU KAMI**

# Komisi II DPR Apresiasi Stikerisasi Pendataan Pemilih di Sulsel

Komisi II DPR RI memuji kinerja KPU Sulsel terkait pendataan pemilih. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufiq Effendi (F-PD) pada rapat koordinasi antara tim Komisi II DPR RI dengan KPU Sulsel, (1/11).



*Tim Ketua Komisi II DPR saat rapat koordinasi dengan KPU Sulsel*

Pendataan dengan sistem menempelkan stiker pada rumah-rumah penduduk dianggap suatu terobosan sederhana namun membawa dampak besar. “Ini kelihatannya kecil namun sangat berarti apalagi di stiker itu tercantum tanggal pemilu, sehingga ini bisa menjadi jaminan bahwa pemilih tidak menggunakan suaranya karena tidak tahu jadwal,” ungkap Taufiq Effendi yang memimpin langsung rombongan Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja reses persidangan kali ini.

Pertemuan dan dialog antara tim Komisi II DPR RI dan KPUD Sulsel di antaranya membahas evaluasi pelaksanaan Pemilu tahun 2009 dan persiapan pemilukada Gubernur/ Wakil Gubernur. Pada kesempatan tersebut, ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas banyak membeberkan kendala serta tantangan yang diha-

dapi dalam pelaksanaan pemilu. Salah satunya terkait daftar pemilih tetap (DPT).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mempertanyakan masalah penanganan perselisihan dan kerusuhan terkait pemilu. Menurutnya, Sulsel sangat identik dengan kerusuhan jika terjadi pemilu. “Bagaimana peran KPU terkait pemilu yang rusuh, dan bagaimana pula upaya yang dilakukan selama ini untuk menyelesaikan riak pemilu yang terjadi itu,” ucap Kyai Aus Hidayat mempertanyakan.

Menganggapi hal pertanyaan anggota dewan, Jayadi mengatakan kerusuhan yang biasa terjadi itu setelah adanya pengumuman sehingga KPU tidak ada kaitannya secara langsung. Namun Jayadi juga membeberkan, sejak 2010 sudah ada 15 anggota KPU di Kab/Kota

yang dipecat karena persoalan kerusuhan yang terjadi akibat pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Hanura, Akbar Faizal tidak ingin membahas mengenai mekanisme dan masalah yang dihadapi KPU selama ini. Ia justru memberi semangat. Katanya, orang-orang yang duduk di KPU merupakan manusia yang sangat berjasa.

“Anda-anda ini merupakan manusia luar biasa karena pemerintahan akan berjalan selama lima tahun ke depan berkat anda. Pemilu sebagai pilar demokrasi harus tetap kita jaga bersama, sehingga ini bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, sehingga pemilu bisa menghasilkan pemerintah yang berkompeten dalam memajukan bangsa,” ungkapnya memberi semangat. (yudi/tvp) foto:tim parle

\*\*\*

# Aparat Hukum Banten harus lebih Tegas dalam mewujudkan Regulasi dan Keputusan

Tim Kunjungan Kerja (kunker) Komisi III DPR RI – Banten yang dipimpin Tjatur Sapto Edy mengkritisi padatnya penghuni Lapas Serang dan masih tercampurnya tahanan narkoba dengan yang lainnya.



Kunjungan Kerja komisi III DPR ke Provinsi Banten

Hal ini disampaikan pada pertemuan dengan Kanwil Kemenkumham Banten Senin, 31/10 yang dilaksanakan di ruang serbaguna DR. Sahardjo, Lapas Serang, Banten. Masalah over kapasitas ini ditanggapi oleh Kakanwil Kemenkumham Imam Santoso yang mengatakan bahwa Banten telah mempersiapkan Lapas Cilegon yang direncanakan selesai awal 2012, serta adanya lahan untuk pembangunan LP Narkoba di Serang yang rencananya di juga akan dibangun Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) dan Rumah Sitaan Negara yang sampai saat ini masih menumpang di gedung rumah tahanan negara Serang. “Kami menunggu penyerahan secara resmi dari pemerintah daerah dan sementara itu kami mengusulkan untuk penyediaan anggaran fisiknya untuk tahun 2012 melalui usulan anggaran yang dikoordinir oleh Setjen Kemenkumham tembusan Ditjen pemyarakatan” jelas Imam.

Secara keseluruhan Tim Kunker Komisi III –Banten ini memberikan apresiasi pada kondisi Lapas Serang khususnya di bidang kebersihan dan kerapian. Ketika menyangkut adanya blok khusus yang ada di Lapas Serang, Anggota Tim Kunker Syarifuddin Suding mempertanyakan penempatan

penghuni pada Blok Santri yang ditengarai belum mempunyai kriteria yang jelas. “Apakah disini ada perlakuan diskriminatif dengan penempatan orang-orang di blok khusus atau blok yang lain. Karena pada dasarnya para narapidana ini harus diperlakukan sama”, ujarnya. Di harapkan lebih lanjut Kepala Lapas dapat

menentukan Regulasi yang tegas dan berkriteria adil dalam penempatan penghuni lapas.

Mengenai desa sadar hukum, Kanwil Banten tahun ini verifikasi dan melakukan pembimbingan di 68 desa sadar hukum di seluruh Kota Kabupaten di Banten dan sudah dibuatkan SK oleh Gubernur, sementara menunggu peresmiannya dalam protapnya oleh Menkumham.

## Kemerdekaan Hakim

Hakim harus memiliki kemerdekaan dalam memutus sebuah perkara. Jangan hanya gara-gara banyak orang berpendapat maka hakim akan terpengaruh dan mengikuti pendapat tersebut. “Pendapat orang banyak belum tentu benar! Keadilan bukan didasari kepentingan banyak pihak. Keadilan itu datang dari Allah SWT dan hati nurani yang bersih” Hal ini disampaikan Tjatur dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan jajaran pengadilan se – wilayah provinsi Banten pada Selasa, 1/11 di Kantor Pengadilan Tinggi Banten.

Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Soemarno, menyampaikan pemaparannya mengenai pengawasan di Pengadilan Tinggi Banten. Pengadilan

Tinggi Banten telah melaksanakan pengawasan ke Pengadilan Negeri se wilayah Banten 2 kali dalam setahun dalam rangka tertib administrasi dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan lebih dari dua kali. Selain melakukan hal tersebut, evaluasi juga menjadi satu hal penting yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten, evaluasi dilakukan kepada satuan kerja di Pengadilan Tinggi Banten dan juga satuan kerja yang berada di pengadilan negeri yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Banten. Evaluasi yang sedang digalakkan oleh Pengadilan Tinggi Banten yaitu mengenai perkara yang belum diputus lewat dari enam bulan. Kalau ada majelis yang belum memutus perkara lebih dari enam bulan maka akan mendapat teguran dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten. “Tapi kami tidak sekedar menegur, melainkan juga meneliti dan menanyakan alasannya mengapa dan apa kendalanya putusan tersebut belum putus dalam jangka waktu lebih dari enam bulan. Selanjutnya akan diberikan apa solusinya” ujarnya.

Sementara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten menekankan pemaparannya pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten. “Seluruh satuan kerja sudah mengembangkan website dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun” ujar Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Tharir Hasan. “Hal ini merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam mengimplemetasikan Tranparansi Putusan di Pengadilan” sambungnya lagi. Keberadaan sarana website juga dimanfaatkan oleh para satuan kerja pengadilan agama se – wilayah Banten untuk memuat laporan penggunaan dan pengelolaan PNPB. (ry)foto: ry

# DPR Ingatkan RSUD Harus berikan Pelayanan Jamkesmas Gratis

Komisi IX DPR meminta Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak boleh menarik biaya kepada peserta Jamkesmas, disisi lain, Rumah sakit harus memberikan pelayanan yang maksimal terhadap peserta Jamkesmas.

“Peserta Jamkesmas harus mendapatkan pelayanan Rumah Sakit dan obat generik secara gratis,” Kata Anita Yacoba Gah dari Partai Demokrat saat Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipimpin Charles Maesang (F-PG), saat mengunjungi RSUD Atambua, Selasa (1/11), Kabupaten Belu.

Anggota dari Fraksi Partai Demokrat Asal NTT, Anita mengingatkan kepada Bupati Beludan Kepala RSUD bahwa Pelayanan Peserta Jamkesmas gratis. jika ada dokter yang mengutip biaya pelayanan atau menjual obat kepada peserta pasien Kepala RSUD diminta untuk menindak tegas.

Anita mengharapkan perhatian dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan memberikan fasilitas alat kesehatan O2 Central, yang sangat dibutuhkan bagimenunjang pelayanan kesehatan RSUD Atambua, dan pengembangan pembangunan gedung.

Bupati Belu Joachim Lopez memaparkan realisasi APBN 2011 bidang kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp.22,2 Milyar, namun hingga saat ini hanya terealisasi 16% atau Rp.2,66 Milyar, dengan rincian yakni Alokasi Dana Bansos yang berasal dari Jamkesmas dan Jampersal sebesar Rp.4,94 Milyar, terealisasi hanya Rp.1,47 Milyar atau 30 persen. Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk BOK dan RSUD Atambua sebesar Rp.17,25 Milyar, namun yang terealisasi hanya Rp.2,18 Milyar atau 13 persen. Selanjutnya dana dekonsentrasi gizi terealisasi 100% yakni Rp.14,2 Milyar.

Lebih lanjut Joachim Lopez memberikan masukan kepada Tim Kunjuran Komisi IX agar Kabupaten Belu mendapatkan penambahan biaya untuk operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, serta jari-



Anggota Komisi IX DPR, Anita Yacoba Gah (paling kanan) saat tinjau RSUD Atambua



Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan melalui program Jamkesmas

ngannya.

Selain itu, diperlukan penambahan pengadaan logistik pelayanan, penambahan dan perbaikan sistem sarana dan prasarana pelayanan, pembiayaan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, pemberian tunjangan perbatasan

bagi tenaga kesehatan, penambahan dan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan terutama sistem pelayanan daerah perbatasan termasuk surveilance perbatasan. (as) foto: tim parle

# Komisi VII Minta CSR Semen Padang Bersinergi dengan Program Daerah

Komisi VII DPR RI minta manajemen PT. Semen Padang, agar program-program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang disinergikan dengan program-program prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat.



Ketua Tim Kunker Komisi VII Azwir Dainitara (kiri) sesaat sebelum membuka rapat

ban tertulis yang lebih komprehensif untuk disampaikan ke Komisi VII DPR RI.

Azwir menyarankan program-program dan dukungan pendanaan untuk pelestarian lingkungan hidup, khususnya di kawasan sekitar lokasi operasi PT Semen Padang agar semakin ditingkatkan.

Azwir juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen PT Semen Padang yang telah menyampaikan data-data dan penjelasan mengenai kegiatan perusahaan.

Sementara Nazarudin Kiemas Anggota Tim Kunker dari F-PDIP yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan keheranannya, mengapa



Anggota Tim Kunker Komisi VII DPR RI, Nazarudin Kiemas



program CSR PT. Semen Padang Salah satunya kegiatan memberi bantuan bencana alam

“Dana untuk program CSR, baik melalui Program Kemitraan (PK), Program Bina Lingkungan (BL) maupun Non PKBL terus ditingkatkan secara signifikan agar nilai manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan,” papar Azwir

Dainitara Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat diakhir pertemuannya dengan Dirut PT. Semen Padang Munadi Arifin di Padang, beberapa waktu lalu.

Terkait dengan program dan pendanaan untuk CSR, Azwir minta jawa-

CSR PT Semen Padang dipergunakan untuk membiayai program-program yang bukan termasuk CSR.

Sedangkan Idris Lutfi dari F-PKS meminta kejelasan sebenarnya berapa total dana bagi CSR PT. Semen Padang. (sc) foto:sc

# Blok Migas Abadi Masela Maluku Dibicarakan Kembali

Proses Participating Interest (PI) 10 persen terkait dengan pengelolaan Blok Migas Abadi Masela sudah diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, baik eksekutif maupun legislatif sejak empat tahun yang lalu, tepatnya tahun 2007 untuk mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen yang sampai saat ini belum ada titik terang.

**B**egitu pula dengan proses eksplorasi delapan tahun lalu sudah dilakukan dengan Provinsi Maluku yang tepatnya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang baru dimekar.

“Koq tiba-tiba Dirjen Migas menyatakan karena sudah diajukan oleh Pertamina dan Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi harus dibicarakan kembali,” kata Melky L. Frans selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku saat ditemui Tim Parle baru-baru ini.

Persoalan dibicarakan kembali dasarnya apa, tanya Melky. Ini sama saja kita mementahkan kembali segala proses yang sudah kita perjuangkan sejak awal, kata Melky. “Sebenarnya ini kita tinggal final. Kita sudah berproses mulai dari BP. Migas dan sekarang tinggal di tingkat Kementerian ESDM untuk ditandatangani, selesaikan,” jelasnya.

Kami disini menduga dengan pengajuan NTT itu bagian dari skenario pemerintah atau pertamina dalam hal ini, duganya.

Menurutnya, NTT mengajukan lalu seakan-akan mau di blunder dengan pembicaraan lagi, yang ujung-ujungnya mungkin mau membagi lagi PI 10 persen yang menjadi hak pemerintah daerah Maluku yang mempunyai teritorial daerah penghasil. Ia minta kepada pemerintah agar dapat membedakan mana kewenangan dan mana batas daerah Blok Masela. Pemerintah juga harus dapat membedakan hak pengelola, kewenangan mengelola dan hak khulayat, hibuhnya.



Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku. Melky L. Frans

Dia menambahkan, Hak pengelolaan PI itu adalah hak daerah penghasil. Ini ‘kan ada di daerah, jadi itu jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 34 yang berbunyi: sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan Participating Interest (PI) 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah.

“Jadi jangan begitulah orang Kementerian ESDM, masa jawabannya seperti itu. Ini sama saja membuka peluang untuk terjadinya perpecahan lagi antar daerah,” tegas Melky. Kita sudah cape dan sudah banyak uang rakyat yang sudah tersedot untuk memperjuangkan ini, baik dipakai oleh pemerintah daerah, DPRD maupun PT. Maluku Energi. Ini ‘kan tinggal mereka

putuskan saja dengan data-data yang ada, koq begitu susah sekali. Susahnya itu dimana sih, tanyanya.

Dia berharap kepada Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat memperjuangkan dan membantu daerah Maluku sesuai dengan aturan yang ada. Begitu juga kepada Menteri ESDM yang baru, Jero Wacik, agar tidak mendengarkan masukan yang macam-macam karena dasar hukumnya jelas, apalagi beliau dari Partai Demokrat yang satu partai dengan saya tentu tidak akan mengecewakan hati rakyat Maluku, tambahnya.

“Komisi VII DPR RI adalah kaum rasional di republik ini, mereka adalah wakil rakyat yang terpilih dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, saya percaya dan yakin Komisi VII DPR RI akan memperjuangkan ini,” tutur Melky.(iw)/foto:iw/parle

# Dewan Minta Infrastruktur Pendidikan Tuntas 2012

Komisi X DPR RI meminta infrastruktur bidang pendidikan harus bisa dituntaskan seluruh daerah pada 2012.



Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin



Gedung sekolah yang sudah semestinya diperbaiki untuk kelancaran belajar mengajar.

“Infrastruktur pendidikan harus tuntas 2012 sehingga tidak ada lagi keluhan sekolah yang rusak yang bisa mengganggu proses belajar mengajar,” kata Ketua Komisi X DPR RI Mahyuddin disela-sela kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Kalsel, Selasa (1/11).

Menurut dia, terpenuhinya sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan sangat berperan membantu program pemerintah yakni program penuntasan wajib belajar tingkat dasar sembilan tahun.

Ia meminta, dinas pendidikan baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota pro aktif melaporkan kondisi kerusakan sekolah disamping mengusulkan dana rehabilitasi sarana prasarana dan infrastruktur tersebut.

Dikatakan, pihaknya memang memiliki data-data kerusakan sekolah tetapi masih belum sempurna dan mencakup keseluruhan sekolah diperlukan data dan laporan dari instansi dan dinas terkait di daerah.

“Langkah pro aktif dinas pendidikan diperlukan sehingga laporan keru-

sakan sekolah bisa disikapi pemerintah daerah dan dicarikan jalan keluar untuk merehabilitasinya,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Ditambahkan, Komisi X DPR RI siap memperjuangkan anggaran rehabilitasi sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan demi mendukung program pemerintah menuntaskan pendidikan dasar sembilan tahun.

Sebelum mengunjungi Martapura, Komisi yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata ini melakukan peninjauan ke beberapa sekolah di Banjarmasin, Kalsel. Sekolah yang dikunjungi yakni SMA PGRI 3, SMK Swadaya, SDN Kuin Selatan dan SMPN 14.

Beberapa sekolah yang dikunjungi Komisi Pendidikan ini, sarana dan prasarananya banyak yang memprihatinkan. Seperti SMA PGRI 3, Komisi X melihat laboratorium komputer di sekolah tersebut sangat terbatas jumlahnya dengan komputer yang cukup tua.

Kondisi ini tentunya tidak dapat dibiarkan, mengingat dukungan peralatan dapat membantu proses belajar mengajar berjalan dengan baik.

Komisi X juga melihat bangunan gedung-gedung sekolah yang ditinjau kondisinya sudah cukup tua dan sudah seharusnya dilakukan renovasi, sehingga tidak membahayakan para siswa yang belajar.

Bahkan saat meninjau di SDN Kuin Selatan, sebagian ruang kelas gedung sekolah tersebut hangus terbakar akibat korsleting listrik yang sampai sekarang bangunan tersebut masih tetap dibiarkan belum ada perbaikan.

Untuk permasalahan sarana dan prasarana sekolah-sekolah tersebut, Komisi X DPR akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan agar kondisi tersebut dapat segera tertangani dan Kementerian Pendidikan memberikan dukungan anggaran bagi sarana dan prasarana sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan di wilayah ini. (tt) foto:tt

# Temuan Komisi IX, BLK NTT Tidak Dimanfaatkan Maksimal

Komisi IX DPR sangat menyayangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Kupang tidak dimanfaatkan dengan maksimal untuk melatih dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Masyarakat.

**M**ereka menemukan peralatan las maupun pertukangan yang dimiliki melalui dana APBN maupun APBD, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Temuan tersebut, saat Komisi IX DPR yang membidangi Tenaga Kerja mendatangi BLK Kupang, dalam rangka Kunjungan Kerja untuk melakukan fungsi pengawasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dipimpin Charles Maesang (F-PG) Selasa (3/11), Kupang.

Melihat realitas yang ada tersebut, Anggota Komisi IX Karolin Margaret Natasa menyatakan perlu adanya evaluasi terhadap BLK dan manfaat adanya BLK. Karena menurutnya banyak BLK diberbagai daerah terlantar dan kurang bermanfaat. "Kita harus evaluasi bermanfaat atau tidak BLK dengan sistem yang sudah ada sekarang, lalu dibuat simulasi, dibandingkan biaya operasional dengan tenaga terampil yang dipersiapkan untuk dapat bersa-

ing dalam dunia kerja," jelasnya.

Dengan dilakukannya evaluasi tersebut maka akan terlihat mengenai ketersesuaian biaya operasional yang telah dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. "Mempergunakan dana puluhan milyar tapi tenaga kerja terampil yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berarti hal tersebut tidak efektif dan tidak efisien. coba di evaluasi," tegas Karolin.

Politisi wanita dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengutip pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang berbicara mengenai revitalisasi BLK dan pemberdayaan BLK, tapi menurutnya sampai saat ini Karolin belum melihat ke arah mana dia (Kemenakertrans) mau membawa BLK ini.

Dia meminta kepada Kemenaker agar menghentikan BLK baru, dan kemudian melakukan

evaluasi terhadap BLK yang ada,

dan hasilnya akan dikaji antara DPR dan Pemerintah untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan dikembangkan terkait dengan penyiapan dan pengembangan kemampuan tenaga kerja Indonesia. "Agar ini menjadi evaluasi yang menyeluruh terhadap BLK," katanya.

Karoline menegaskan BLK sekarang adalah bersifat pasif, sehingga setelah dilakukan evaluasi diharapkan ditemukan kebijakan terhadap BLK sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Kritikan bagi BLK juga ditegaskan Zulmiar Yanri yang juga kecewa dengan kondisi yang ditemuinya, menurutnya Pengembangan dan pemanfaatan BLK diperlukan kreativitas. "BLK dapat bekerjasama dengan perusahaan atau swasta, atau dapat dalam bentuk pelatihan pembantu rumah tangga atau bekerjasama perusahaan PJTKI," katanya.

Dengan adanya kreativitas, BLK dapat mencapai tujuan visi dan misinya, sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan SDM dalam menghadapi daya saing dunia kerja. (as) foto:as



Komisi IX DPR saat meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) di Kupang, NTT



Anggota Komisi IX DPR, Karolin Margaret Natasa

# Syamsul Bachri Soroti Soal Lingkungan Hidup di Maluku

Anggota Komisi VII DPR RI, Syamsul Bachri dari Fraksi Partai Golkar menyoroti persoalan lingkungan hidup di Provinsi Maluku.

Penyebabnya, pencemaran lingkungan oleh PT. Kalrez Petroleum (Seram) Ltd di Maluku karena adanya tumpahan minyak yang disebabkan oleh kapasitas tanki yang tidak sesuai sehingga minyak mentah Maluku keluar sampai ke laut.

“Nampaknya masalah lingkungan hidup ini tidak terlalu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku,” kata Syamsul Bachri dalam pertemuan dengan Gubernur Provinsi Maluku, Karel Albert Ralahalu, di Kantor Gubernur Maluku saat kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Maluku baru-baru ini.

Menurutnya, kita sudah punya Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah semakin tegas, dan kita juga sudah memiliki Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, tapi umumnya tidak diketahui oleh Pemda dan masyarakatnya. Siapa yang mengetahui soal ini dan langkah apa yang sudah ditempuh, tanya Syamsul.

Ia menghimbau kepada Pemda Maluku agar masalah ini dapat disosialisasikan. Karena, lanjutnya, disamping kita mengejar pertumbuhan ekonomi dan lain-lain sebagainya, kita juga wajib memelihara lingkungan kita yang lestari. “Maluku ini ‘kan terdiri dari pulau-pulau, jadi sangat pantas untuk menjaga lingkungannya,” tuturnya.

Komisi VII DPR yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Lingkungan Hidup meminta kepada Pemda Maluku khususnya lingkungan hidup ini menjadi perhatian serius. Karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil dengan bentangan laut yang sangat luas yang menyimpan kekayaan alam yang berlimpah dan Maluku juga sangat kaya ikan, apabila lautnya tercemar oleh tumpahan minyak ini akan sangat



Anggota Komisi VII DPR, Syamsul Bachri (kiri)

terganggu, hiburannya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Maluku, Melky L. Frans menjawab dan mengakui tumpahan minyak terhadap ancaman lingkungan yang luar biasa besar alirannya sedikit kelam, tetapi dalam satu bulan sudah dapat diselesaikan oleh PT. Kalrez Petroleum (Seram) Ltd. “Tumpahan minyak dari PT. Kalrez Petroleum (Seram) Ltd akibat human error,” jelasnya.

Melky menambahkan, kami dari Komisi B DPRD Maluku sudah turun kelapangan dan melihat langsung tumpahan minyak itu yang didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM. Kami telah mengkaji lingkungannya, kata Melky seraya menambahkan dampaknya memang ada tetapi

dampak negatifnya tidak seperti yang diberitakan oleh media.

Dia juga dukung berita media karena media itu adalah bagian dari kontrol sosial, dan akibat dari pemberitaan itu adalah aksi-aksi yang disampaikan oleh masyarakat yang diwakilkan oleh adik-adik mahasiswa dari Seram Bagian Timur, tambahanya.

“Itulah yang mendorong kami dari pemerintah daerah provinsi maupun dari Komisi B DPRD Maluku turun kelapangan dan melihat langsung dan itu hasilnya,” jelas Melky.

Jadi dampak lingkungan tetap ada tetapi dampak lingkungan yang berdampak sangat negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat tidak ada, tuturnya.(iw)/foto:iw/parle

# Komisi VII DPR minta Pemda Maluku Tingkatkan SDM

Indonesia masih dihadapkan berbagai masalah energi, salah satunya Energi Baru Terbarukan (EBT) yang masih belum optimal. Karena kendala dalam pengembangan EBT diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas.



Anggota Komisi II DPR, Dewi Aryani Hilman (tengah)

**A**nggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani Hilman dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM di Maluku, tidak terlalu sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk peningkatan kapasitas keilmuan SDM di Maluku, terutama di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Migas dan Lingkungan Hidup.

“Karena jumlah penduduk di Maluku tidak terlalu besar, jadi Gubernur Maluku tidak terlalu sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut,” tutur Dewi saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku baru-baru ini.

Kita harus fokus dan kenapa saya katakan fokus disitu, jelasnya, ini semua untuk mempersiapkan diri merebut tempat-tempat strategis dimana pada saat Blok Masela mulai memproduksi putra-putra Maluku dapat menduduki tempat-tempat strategis,

tambahnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Maluku harus siap dengan SDMnya. Siap punya sarjana bidang energi, siap punya sarjana bidang lingkungan hidup, siap punya pasca sarjana, dan siap punya dokter sehingga bisa mengantisipasi seperti kejadian yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana warga sekitar disitu dan warga asli NTB justru tidak menduduki tempat-tempat strategis.

Dewi sangat mengerti, mana mungkin pengusaha itu menerima karyawan asal-asalan. Kalau putra daerah tidak bisa apa-apa juga percuma dan pengusaha itu tidak akan mengambilnya. Tapi kalau putra daerah itu berprestasi bagus, baik dan pintar, saya rasa pengusaha tidak perlu lagi mewawancarainya karena dia sudah oke untuk masuk jadi manager misalnya. “Saya itu sedih rasanya mendengar kalau rakyat Maluku hanya jadi tukang sapunya, hanya jadi satpamnya di perusa-

haan itu,” tuturnya.

Apakah Kementerian ESDM atau Dirjen EBT pernah mengeluarkan surat mengenai prosedur permohonan untuk kajian, tanya Dewi.

Ia minta kepada Gubernur Maluku agar masalah ini dapat diperhatikan dengan serius. Komisi VII DPR RI siap membantu gubernur apabila ada putra-putra dari Maluku yang membutuhkan beasiswa di Universitas Indonesia atau Universitas Airlangga yang memang betul-betul berprestasi. “Saya secara pribadi mengajukan untuk memberikan rekomendasi mendapatkan beasiswa,” kata Dewi.

“Jadi harapan kita punya SDM yang handal disini, terutama untuk mempersiapkan SDM menjelang produksi beberapa blok yang ada di Maluku,” ujarnya.

Menjawab masalah EBT Migas dan Lingkungan Hidup, Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu mengatakan, kami sudah mengajukan kepada Kementerian ESDM tetapi kami tidak mendapatkan dana untuk itu.

Karel menambahkan, kami sudah melakukan penelitian-penelitian awal, lalu kami meminta untuk pengembangan ke studi kelayakan atau pengembangan lebih lanjut tapi Kementerian ESDM khususnya di Ditjen EBT minta harus dibuat studi kelayakan dulu baru bisa dikembangkan oleh kementerian. “Sedangkan untuk studi kelayakan itu biayanya sekitar Rp 300 sampai Rp 400 juta sehingga kami hanya bisa membuat satu dalam setahun,” tambahnya.

Mungkin Komisi VII DPR RI dapat membantu kami supaya kami bisa melakukannya. Karena kita punya potensi EBT ini sangat banyak, harapnya.(iw)/foto:iw/parle

\*\*\*

# Komisi VII DPR RI Kecewa Kondisi PLTU Teluk Sirih Memprihatinkan

Komisi VII DPR RI kaget dan kecewa terhadap kondisi proyek pembangunan PLTU Teluk Sirih di Padang, Sumatera Barat.



Anggota Komisi VII DPR, Asfihani

Hal tersebut diungkapkan seluruh Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI saat meninjau langsung ke lokasi pembangunan PLTU Teluk Sirih beberapa hari lalu.

Asfihani (F-PD) disela-sela kunjungan di PLTU Teluk Sirih menyatakan kekecewaannya, bahwa apa yang dibayangkan di DPR saat menetapkan subsidi listrik 45 Triliun dimana PLN mengatakan itu termasuk proyek yang on schedule. Ternyata pada proyek PLTU Teluk Sirih terjadi kemunduran, hal ini akan berdampak terhadap nilai subsidi itu sendiri.

“DPR pada saat menetapkan subsidi listrik 45 Triliun, DPR minta kepada PLN 45 Triliun itu untuk apa saja kegiatannya. Dijelaskan PLN bahwa salah satunya adalah target PLTU 10.000 MW yang salah satunya ditetapkan pemerintah adalah pembangunan PLTU Teluk Sirih di Sumatera Barat,” terang Asfihani.

“Ternyata kondisi di lapangan ada pengunduran waktu hampir 10 bulan, artinya ada dampaknya pada subsidi

listrik tersebut,” tambahnya.

Artinya jika dihitung 45 Triliun subsidi tadi harus ontime pada saat 2012 ini, tapi jika tidak terealisasi maka subsidi itu tidak 45 Triliun lagi, pasti menjadi lebih besar. “Jika target tidak terpenuhi ini akan melampaui dari batas subsidi daripada yang kita tetapkan di Senayan,” terangnya.

“Hal ini berarti menimbulkan persoalan baru, karena dari perencanaan PLN dalam melakukan suatu proyek itu tidak tepat,” papar Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan.

“Dengan temuan ini, Komisi VII DPR RI akan minta Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi agar melakukan pengawasan ketat terhadap semua proyek-proyek PLN, dan kita akan mengundang PLN dan pengusaha yang bertanggung jawab terhadap pembangunan PLTU Teluk Sirih,” imbu Asfihani.

Berkaitan dengan amdal, Sutan Sukarnotomo (F-PD) mengharapkan pada waktu kegiatan itu berjalan maka tidak ada dampak terhadap masyarakat,

air laut dan lingkungan sekitar.

“Kami tidak tahu amdalnya dibuat seperti apa, yang pasti pembangunan proyek PLTU ini membelah gunung atau bukit, tentunya ada efek atau dampak terhadap apakah itu merusak lingkungan dan lain sebagainya,” kata Sutan.

“Tapi jika amdal itu dibuat dengan benar, tidak akan menjadi masalah. Dan juga kalau rekomendasi amdal itu dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam hal ini PLN tidak masalah, yang penting dokumen amdal itu tidak sekedar dokumen, artinya harus dilaksanakan dan ditaati,” tambah Sutan.

Sutan minta PLN untuk mengantisipasi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan, jangan sampai kejadian di PLTU Cilacap terjadi di PLTU Teluk Sirih.

Sementara Heriyanto (F-PD) kecewa kenyataan di lapangan produk china mendominasi pada proyek pembangunan PLTU Teluk Sirih.

“Sebetulnya berapa banyak kandungan lokal yang digunakan pada proyek pembangunan PLTU Teluk Sirih. Hal ini penting karena bahan baku di-negara Indonesia banyak dan perundang-undangan kita mengamanatkan demikian,” tanya Heri.

Menurut Heri, bahwa setiap proyek-proyek pemerintah harus mengutamakan produk dalam negeri. “Namun yang kita lihat di lapangan, besi saja dari china semua. Ini termasuk tidak patuh terhadap perundang-undangan,” paparnya.

Heri juga mempertanyakan berapa banyak PLTU Teluk Sirih melibatkan SDM lokal. Hal ini penting, dengan melibatkan SDM lokal diharapkan ada hubungan emosional dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap PLTU Teluk Sirih. (sc) foto:sc

\*\*\*

# Komisi X Tanyakan Masalah Otonomi Pendidikan Di Kalsel

Komisi X DPR RI mempertanyakan permasalahan apa yang dihadapi sehubungan dengan diberlakukannya otonomi pendidikan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

**M**enurut Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Popong Otje Djunjuran, banyak kalangan mengatakan otonomi pendidikan harus dikaji kembali. Bahkan dalam sebuah lokakarya yang membahas masalah otonomi pendidikan, hasil lokakarya tersebut semua mengatakan khusus untuk otonomi di bidang pendidikan memang perlu dikaji kembali.

Terhadap kenyataan tersebut, Popong menanyakan pendapat Gubernur Kalsel terkait otonomi pendidikan ini dan kendala-kendala apa yang dihadapi provinsinya sehubungan dengan otonomi pendidikan.

Pertanyaan itu disampaikan Popong saat Komisi X DPR mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Selatan dan jajarannya, Senin lalu, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur.

Terkait dengan permasalahan otonomi pendidikan, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) September lalu, di Jakarta, merekomendasikan kepada pemerintah agar otonomi pendidikan dikembalikan kembali ke pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo menilai setidaknya dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini terjadi banyak persoalan di dalamnya.

Persoalan yang dimaksud di antaranya adalah pengadaan guru, rekrutmen dan penempatannya, kesejahteraan (khususnya guru non PNS), perlindungan dan jaminan hidup para guru di hari tua.

PB PGRI meminta DPR dan DPD agar di dalam Undang-undang Pemerintah Daerah, otonominya dapat dikurangi, yaitu mengembalikan pendidikan kepada pemerintah pusat.

Menanggapi persoalan otonomi pendidikan, Gubernur Kalsel Rudy

Ariffin mengatakan, dia melihat otonomi pendidikan sangat mendasar menyangkut pengelolaan anggaran cukup besar untuk pendidikan yang sudah disediakan oleh APBN.

Namun tentunya, otonomi pendidikan memerlukan satu pengaturan yang sebaik-baiknya, misalnya apa yang lebih dibutuhkan di suatu daerah, apakah SMA atau SMK. "Di sini harus ada link match-nya kalau yang dibutuhkan SMK sebaiknya yang diperbanyak SMK bukan SMU nya," kata Rudy.

Oleh karena itu dia berharap bahwa dalam implementasi otonomi pendidikan, perencanaan daerah lebih mendominasi karena ada need assessment yang dilakukan terlebih dahulu.

Diakembalimencontohkan, awalnya satu-satunya universitas yang memiliki Fakultas Kehutanan hanya di Universitas Lambung Mangkurat. Siswa siswi lulusan SMA baik dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat banyak yang masuk di fakultas ini.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kaltim dan Kalbar membuka juga Fakultas Kehutanan, sehingga mahasiswa Fakultas Kehutanan di Universitas Lambung Mangkurat turun drastis.

Melihat kondisi ini, diperlukan pengaturan misalnya Kalsel perkuatannya dimana apakah tanaman pangan, apakah perikanan dan sebagainya. Jadi di sini tidak terjadi saling berlomba antara universitas yang satu dengan universitas yang lain di Kalimantan.

"Jadi inilah salah satu penyebabnya mengapa penduduk di Kalsel naik tapi mahasiswa mengalami penurunan



Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin

untuk program-program studi tertentu," katanya.

Rudy menambahkan, disinilah pentingnya pengaturan itu dalam otonomi pendidikan, sehingga tidak terjadi saling berebut antara universitas yang satu dengan universitas yang lain. Tentunya perlu diingat, dana yang telah dikeluarkan untuk membuka satu fakultas sangat besar, dan kita ingin mutu tetap dapat terjaga, begitu juga pemerataannya.

Dia juga berharap, otonomi pendidikan memberikan suatu kebijakan dimana satu daerah mengembangkan pendidikan- pendidikan unggulan masing-masing sampai ke perguruan-perguruan tinggi. (tt)

\*\*\*

# Sekretariat Jenderal Ujung Tombak DPR

Sekretariat Jenderal DPR adalah ujung tombak bagi pelaksanaan tugas Dewan secara kelembagaan. Oleh karenanya, komunikasi dan koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan.



Rapat Koordinasi Kedeputan Bidang Persidangan dan Kerjasama antar Parlemen di Bandung.

Demikian disampaikan Deputi Persidangan dan KSAP, Achmad Djuned, SH, M.H. dalam Rapat Koordinasi Kedeputan Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen, Bandung, (7-8 / 11) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Djuned juga menegaskan bahwa keberhasilan Sekretariat Jenderal adalah sebagai buah dari kerjasama yang baik. “banyak sekali kegiatan di DPR untuk tahun yang akan datang, kegiatan utama yang akan menjadi perhatian penting adalah ; laporan kinerja, Sidang Bersama, penyelenggaraan sidang sidang berskala internasional, Khusus untuk laporan kinerja Dewan, harus sudah disiapkan sebelum tanggal 29 Agustus, sehingga penting bagi kita untuk tetap bekerja sama dengan baik,ujarnya.

Beberapa hal yang mencuat dalam rapat koordinasi tersebut, selain masalah komunikasi dan koordinasi, masalah penyerapan anggaran pada

sekretariat AKD juga menjadi fokus utama rapat yang berlangsung selama dua hari tersebut. “Untuk tahun ini, penyerapan anggaran AKD sangat rendah, demikian diakui Djuned. Sejak adanya Moratorium memang ada perubahan dalam volume kunjungan Dewan keluar negeri. “Kita memang agak “ngerem” sedikit untuk kegiatan AKD ke luar negeri, mengingat yang diijinkan saat ini adalah yang berhubungan dengan fungsi legislasi Dewan” terang Djuned. Oleh karenanya sangat dapat dipahami bahwa penyerapan anggaran di AKD rendah, lanjutnya.

Djuned juga mengingatkan bahwa untuk tahun 2012, kunjungan kerja komisi yang semula 4 x menjadi hanya 1 x , “ Terkait pengurangan pelaksanaan Kunker, BURT sudah memutuskan mengenai hal tersebut,” jelasnya. Seiring dengan aktivitas Persidangan dan rapat rapat lainnya, Djuned menegaskan bahwa dokumen-dokumen rapat, risalah-risalah rapat sangat pen-

ting untuk diperhatikan. “dalam beberapa kasus terbukti bahwa risalah dan dokumen rapat sangat diperlukan, maka sudah sewajarnya jika hal-hal tersebut dapat diperhatikan dengan baik, khususnya oleh Sekretariat di AKD”

Mengomentari apa yang mengemuka dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Biro Persidangan, Drs. Bambang SN, M.A.P, menghimbau agar masing-masing Sekretariat AKD segera membuat laporan pertanggungjawaban, melakukan evaluasi terhadap kinerja T.A. serta penyampaian hasil kunker agar lebih dapat diperhatikan, “hal tersebut sangat diperlukan, maka penting sekali untuk selalu berkoordinasi,” katanya.

Karo Pimpinan, Tatang Sutharsa, S. H. yang juga hadir dalam rapat sedikit menyinggung tentang penyusunan buku Tim Kinerja. “kerjasama itu harus dan sesuai dengan apa yang diamanatkan Tatib, maka penyusunan buku Tim Kinerja juga harus mendapat perhatian,” singgungnya.

Menyambung apa yang dikemukakan oleh Karopim, Karo Humas dan Pemberitaan, Drs. Jaka Dwi Winarko, menambahkan, “kerjasama dan koordinasi adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi terkadang sulit untuk dilakukan, tetapi dengan adanya rakor seperti ini, kedepan nanti Biro Humas dan Pemberitaan sangat optimis bisa bekerja dengan lebih baik, ’.

Beberapa hal penting yang disampaikan oleh masing masing Kepala Bagian menjadi pokok bahasan dalam rapat koordinasi tersebut, diantaranya; masalah Arsip, SMS gateway, PPID, KIP, TOR Kunjungan kerja, sampai pada permasalahan sidang multilateral. (Djs) foto:dj/parle

# Komisi VII DPR RI akan Memanggil Pihak Pengembang PLTU Teluk Sirih

Komisi VII DPR RI menilai penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih di Padang Sumatera Barat berpotensi mundur. Terkait hal tersebut Komisi VII DPR RI berencana akan memanggil pihak pengembang PLTU Teluk Sirih ke DPR RI.

Hal tersebut dikemukakan Azwir Dainitara Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat disela-sela kunjungannya ke PLTU Teluk Sirih, beberapa waktu lalu.

Azwir menyatakan perlu adanya komitmen dari pihak pengembang agar penyelesaian pembangunan PLTU Teluk Sirih tepat waktu, sehingga dapat mengurangi penggunaan BBM dan beban anggaran subsidi energi.

“Terkait dengan pembangunan PLTU Teluk Sirih ini akan kami tindaklanjuti dan akan menjadi masukan bagi Panja Hulu Listrik Komisi VII DPR RI yang hingga saat ini masih bekerja,” kata politisi Fraksi Partai Golkar.

Penyelesaian pembangunan PLTU Teluk Sirih menurut Azwir harus disinkronkan dengan pembangunan jaringan transmisi sehingga nantinya energi listrik yang diproduksi dari PLTU Teluk Sirih dapat disalurkan tepat waktu.

Azwir menyarankan perlu adanya perencanaan yang baik terhadap supply batubara agar kebutuhan untuk



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR, Azwir Dainitara (tengah) Sirih, pihak PLN memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal terutama daerah sekitar PLTU.

Pihak PLN harus mempertimbangkan dampak lingkungan atas pembangunan PLTU Teluk Sirih, termasuk di dalamnya pengurangan emisi dari pembakaran batubara.

Azwir mengingatkan agar dalam kegiatan pembangunan PLTU Teluk

Politisi dari Dapil Sumatera Barat ini juga meminta agar pihak PLN Sumatera Barat memberikan tambahan data dan penjelasan secara tertulis yang lebih komprehensif. (sc) foto: sc \*\*\*

## Industri Pertambangan Dukung Kegiatan Perekonomian Daerah

Komisi VII DPR RI berharap industri pertambangan mampu mendukung kegiatan perekonomian di daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, sektor ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, sekitar terutama akibat kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkannya.

“Oleh karenanya manajemen pengelolaan sektor pertambangan dan proses produksi mesti dilakukan secara baik. Hal tersebut menjadi tanggungjawab bersama,

baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun perusahaan dan masyarakat,” ujar Azwir Dainitara saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Sumatera Barat (Sumbar) dengan beberapa perusahaan pertambangan yang berada di Sumbar, di Padang, beberapa hari lalu.

Melalui pertemuan ini, Tim Kunjun-



Azwir Dainitara saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat

gan Komisi yang membidangi Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi serta Lingkungan Hidup berharap, adanya informasi dan penjelasan langsung mengenai perkembangan

kegiatan usaha pertambangan dari perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan

Azwir mengatakan bahwa DPR

dan Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU tersebut menjadi acuan dalam upaya perbaikan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara bagi kepentingan di dalam negeri.

Khusus di wilayah Sumatera Barat, berdasarkan data dari Kementerian ESDM pada akhir September 2011, bahwa dari 262 perusahaan pertambangan, yang statusnya tidak bermasalah (clear and clean) hanya 93 perusahaan pertambangan. "Permasalahan ini harus menjadi saah satu perhatian dan segera diselesaikan," tegas Azwir.

Hadir dalam pertemuan tersebut Dirum SDM PT Tambang Batubara Bukit Asam, Dirut PT Penta Bersama Gemilang, Dirut PT Bina Bakti Pertiwi, Direktur PT Multi Mineral Magtic dan Dirut Thomas Jaya Trecimplant. (sc) foto:sc

## Kejaksanaan Diminta Independen Dalam Tangani Korupsi Kepala Daerah

Penyelesaian kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap, Walikota Medan, Sumut dinilai berlarut-larut. Pasalnya sejak ditetapkan menjadi tersangka korupsi setahun lalu belum ada tindak lanjut pengembangan perkara ini.



Komisi III DPR dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara

**P**ublik dapat menilai tekanan politik yang membuat aparat kejaksaan tidak berani bertindak karena walikota adalah Pembina Partai Demokrat, Sumatera Utara.

"Kalau kita lihat daerah lain Bupati Tegal, tiga bulan setelah ditetapkan tersangka langsung ditahan itu dari PDI Perjuangan. Nah kalau Rahudman Harahap, Walikota Medan, dia-kan Dewan Pembina Partai Demokrat di Sumut ini, apa karena itu aparat kejaksaan belum ada tindak lanjut pengembangan kasus?," tanya anggota Komisi III dari FPDIP Trimedya Panjaitan dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Sumut di Kantor Kajati, Medan, Sumut, Senin (31/10).

la juga memaparkan tindakan cepat



aparatus kejaksaan terhadap mantan Bupati Tobasa, Sumut yang juga terjerat kasus korupsi. Walaupun telah mengembalikan uang yang menjadi kerugian negara, ia tetap diadili dan divonis 2 tahun penjara. “Apa hukum ini dikendalikan kekuasaan. Kami dari Komisi III berharap kejaksaan dapat meningkatkan kinerja, menjaga independensi, paling tidak mendekati kinerja KPK,” lanjut Trimed. Lebih jauh wakil rakyat dari dapil Sumut II ini mengkritisi laporan Kajati yang menyebut ada 12 Kejari yang ternyata nihil kasus korupsi. “Ini karena benar-benar tidak ada kasus korupsi, atau karena tidur?”

Dalam pertemuan yang merupakan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumut ini, anggota Komisi III dari FPAN Yahdil Abdi Harahap menyoroti laporan Kajati yang tidak menyebutkan kasus ilegal logging yang telah ditangani di Sumatera Utara. “Kenapa masalah ilegal logging tidak disebutkan disini. Ini kejahatan serius yang terorganisir dan bersifat masif bukan masyarakat biasa yang mencuri kayu. Kasus ini banyak terlihat di dapil saya Sumut 2, yang bermasalah siapa, kehutanan, kepolisian atau kejaksaan,” tandasnya.

Sementara itu Edi Ramli Sitanggang anggota Komisi III dari FPD menyoroti tidak berjalannya hirarki dalam organisasi kejaksaan. Ada kecenderungan Jaksa Tinggi tidak memiliki kewibawaan

terhadap Kejari. “Ini akibat sentralistik yang masih berlangsung di Kejaksaan, penetapan kepala seksi saja masih dari Kejagung,” katanya. Berbeda dengan institusi Kepolisian dan Pengadilan yang sudah berhasil mendelegasikan sebagian kewenangan, seperti Kapolres sudah dapat diusulkan Kapolda. Pengadilan juga sudah mulai membaik, pejabat di Pengadilan Negeri diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. “Seharusnya Kajati bisa mengusulkan Kajari, dipecat apabila tidak berhasil atau promosi kalau dinilai bagus.”

Menjawab hal ini Ketua Kejaksaan Tinggi Sumut, A.K. Basyuni Masyarif menyatakan proses penetapan Walikota Medan sebagai tersangka korupsi dilakukan oleh pejabat sebelumnya. “Kalau keputusan itu terburu-buru memang itu faktanya,” paparnya. Sebelum melimpahkan ke pengadilan ia berprinsip semua harus memenuhi syarat formil dan materil. Sejauh ini menurutnya kondisi itu belum dapat dipenuhi. “Semua sekarang menyalahkan saya tapi sementara ini bukan pekerjaan saya. Jadi posisinya seperti mundur kena maju kena.”

Kondisi ini menurutnya telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Bahkan tim dari KPK secara khusus juga sudah melakukan supervisi terhadap kasus ini. Ia meminta segenap pihak bersabar menunggu seluruh proses dapat

dilengkapi. Saat ini menurutnya kejaksaan sedang meminta BPKP melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kerugian negara dalam kasus kredit bermasalah yang mencapai Rp. 5 milyar. “Saya harus menata ulang administrasi perkara yang memenuhi syarat formal dan materil,” tekannya.

Ketua Komisi III Benny K. Harman yang memimpin jalannya pertemuan meminta kejaksaan serius menuntaskan perkara dugaan korupsi Walikota Medan. Ia juga meminta diperlihatkan bukti surat permohonan izin pemeriksaan kepala daerah yang telah diajukan kepada presiden. “Kami pernah dibohongi habis-habisan, pernah dijelaskan ada surat nomor sekian, tahu-tahu surat itu tidak pernah ada. Ini pernah terjadi tapi saya tidak mau sebut propinsinya,” imbuhnya.

Ia memberi apresiasi setelah surat tersebut ternyata dapat ditunjukkan oleh Kajati. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini juga meminta aparat kejaksaan tidak ragu untuk menindak politisi bermasalah termasuk dari partai berkuasa. “Partai Demokrat tidak ada maksud, tidak punya niat melindungi, tidak ada. Gubernur, menteri saja tidak dilindungi apalagi walikota begitu. Jadi kejaksaan bangkitlah, bergeraklah. Itu ajakan kami, terlalu lama kita tidur lelap,” tegas Benny K. Harman. (iky) foto:iky

# Komisi I Dukung Peran Korem 045-Garuda Jaya di Wilayah Bangka Belitung

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung peran Komando Resor Militer (Korem) 045/Garuda Jaya dalam pembangunan kekuatan pertahanan di Wilayah Bangka Belitung.

“Komisi I akan membahas aspirasi Danrem 045/Garuda Jaya dalam Rapat Kerja dengan Kemenhan dan Panglima TNI, termasuk dukungan anggaran,” kata Anggota Komisi I Yahya Sacawirya.

Dalam Kunjungan Kerja Komisi DPR bidang Pertahanan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman (F-PD), mengadakan pertemuan dengan Danrem 045/Jaya, Danlanal Babel, dan Danlanud Belitung, di Lanal Babel, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (9/11).

Berbicara hakekat ancaman, Yahya Dewan dari Fraksi Demokrat yang juha Mayjen TNI Purnawirawan mengatakan dulu konsep kita menitikberatkan pada masalah sosial politik, sehingga prediksi ancaman dari dalam, maka wilayah bangka belitung aman. Namun sekarang harus dipandang dari TNI sebagai fungsi pertahanan maka harus lebih banyak melihat sistem pertahanan nasional dihadapkan kepada hakekat ancaman yang datang dari luar.

Wilayah Bangka Belitung merupakan corong Barat, konsep pertahanan bukan berarti akan menghadapi situasi perang tapi kita harus mempunyai efek getar. Yahya memandang perlu dipersiapkan alutsista dengan tidak melupakan kesejahteraan. Wilayah Babel telah mempunyai Korem, dari 7 Kabupaten/kota, maka minimal harus ada penambahan 2 Kodim di bangka dan 1 kodim di belitung, sehingga dia dapat mempersiapkan kekuatan wilayah darat.

Komandan Korem 045/Garuda Jaya Kolonel Gunung Sarasmoro memaparkan bahwa Korem 045/Gaya terbentuk sejak 15 Juni 2010 dengan membawahi Kodim 0413/Bangka dan Kodim 0414/Belitung, serta Tim Intel Korem yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemenuhan personel semikian dengan personel Makorem.

Sekalipun terdapat beberapa kendala seperti personel, materiil, pangkalan sarana Kodal dan dukungan logistik,



Anggota Komisi I DPR, Yahya Sacawirya (kanan)

Gunung mengatakan jajaran Komando Korem telah berupaya secara maksimal mewujudkan tugas pokok yang diembannya. “Pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Korem 045/Garuda Jaya pada TA 2011 dapat dilaksanakan walaupun dengan kondisi yang masih belum optimal,” ungkapnya.

Selanjutnya, secara umum Danrem menjelaskan kondisi Satuan Korem 045/Gaya ditinjau dari persiapan operasional meliputi bidang operasi, personel, materiil, Pangkalan dan piranti lunak masih sangat kurang bila dihadapkan pada kesiapan operasional kesatuan. “Perlu diusulkan dibentuknya Kodim Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur,” kata Kol Gunung.

Selain itu, Kol Gunung memberikan masukan kepada Komisi Pertahanan DPR RI, dengan dibentuknya Korem

045/Gaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dibentuk Badan Pelaksana Aju Korem seperti Ajenrem, Denbekang, Denkes, dan pendukung lainnya.

Kebutuhan lainnya yang sangat mendesak saat ini adalah pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana air bersih yang ada di Makorem, dikarenakan tidak layak dikonsumsi dengan Ph air 2,7. Lainnya adalah mohon dukungan adanya penambahan kendaraan operasional di Makorem 045/Gaya dan pemenuhan pemenuhan atas keterbatasan perumahan Makorem secara kualitas.

Dislokasi Makorem 045/Garuda Jaya perlu pertimbangan menjadi Satuan Tempur seperti Batalyon Infanteri, agar tidak menghambat koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas pokok. (as) foto:as

# Sekjen DPR Resmikan 6 Sistem Aplikasi Internal

Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh meresmikan enam aplikasi baru yang diperuntukkan untuk lingkungan Setjen DPR dalam menunjang kinerja Dewan.

**K**eenam aplikasi baru tersebut diantaranya aplikasi administrasi tata persuratan, aplikasi Minangwan, aplikasi perpustakaan, aplikasi analisis BPK dan pengawasan DPD, aplikasi pengkajian dan Aplikasi Sistanang.

Peresmian enam aplikasi tersebut ditandai dengan pemencetan tombol touchscreen layar LCD sebagai tanda bahwa aplikasi tersebut secara resmi mulai diberlakukan secara umum di lingkungan Setjen DPR.

“Khusus sistem Tenaga Ahli dan anggota (Sistanang) itu mengakomodir sekitar 1800 orang tenaga ahli maupun anggota mulai dari proses rekrutment, maupun informasi lainnya,”kata Nining saat meresmikan sistem tersebut di Gedung Setjen DPR, Jum’at,(11/11).

Menurutnya, sistem ini dapat memudahkan karyawan Setjen DPR dalam melakukan pendataan, maupun menjalankan tugasnya sehari-hari. “khusus aplikasi pengkajian juga sangat mendukung pelayanan anggota khususnya dalam mencari kajian penelitian terkait kasus yang ada,”jelasnya.

Dia menambahkan, saat ini E-parliament menjadi isu sentral dalam percaturan pergaulan parlemen di dunia karena terkait dengan dukungan teknis dalam menunjang kinerja parlemen.

Sementara Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Sekretariat Jenderal DPR Winantuningtyas mengatakan, program ini semuanya merupakan mayoritas buatan karyawan DPR RI. Aplikasi ini, jelas Win, bertujuan merespon kebutuhan IT dalam memberikan dukungan teknis terhadap tugas dan fungsi Dewan.

“Misalnya saja sistem aplikasi Sistanang bertujuan membenahi sistem yang diperuntukkan bagi tenaga ahli dan anggota DPR dan sistem



Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh saat meresmikan enam aplikasi baru untuk lingkungan Setjen DPR RI

ini akan link ke bagian keuangan dan hukum,”paparnya, selain itu sistem nantinya juga akan terintegrasi dengan bagian pelayanan kesehatan (Yankes) DPR namun masih belum final.

Kepala pusat P3DI Damayanti mengatakan, P3DI telah meluncurkan kurang lebih 16 sistem aplikasi yang dikerjakan sendiri. Pada tahun 2014 nanti secara keseluruhan akan

terdapat 36 aplikasi sesuai kebutuhan unit yang ada. “Tahun depan kita akan meluncurkan 6-7 aplikasi, bahkan kita mulai mengembangkan website BKSAP, Arsip dan dokumentasi, maupun Korpri,”jelasnya.

Dia menambahkan, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dewan maupun para karyawan Setjen DPR RI. (si) foto: tim parle





Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dipimpin Hayono Isman. 7-9/11/2011 foto:AS



Rapat Koordinasi Kedeputan Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen yang dihadiri Jajaran Deputi Persidangan dan KSAP Bandung, 7-8 November 2011



Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipimpin Charles Maesang. 31/10-3/11 2011 foto:AS



Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Provinsi Sumatera Barat, yang dipimpin Azwir Dainitara (kanan). 31/10-2/11 2011 foto:SC



Delegasi Parlemen Australia Komite Hubungan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan yang dipimpin Michael Danby, diterima Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto didampingi Ferrari Romawi, Emil Abeng dan Atte SUGandi di Ruang Pimpinan DPR. 10/11/2011. foto:RY

